

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Said mengemukakan bahwa: Partisipasi adalah hak dasar yang memungkinkan setiap individu dan kelompok untuk terlibat dalam setiap keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan masa depan mereka sebagai warga negara (Said, 2020: 102). Partisipasi dalam pembangunan adalah suatu bentuk keikutsertaan aktif masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kontribusi fisik, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Sulastrri, 2019: 121).

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Soekanto mengemukakan bahwa: masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki interaksi sosial, norma, dan kebudayaan yang sama yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya dalam sebuah sistem sosial (Soekanto, 2015: 12). Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dalam satu wilayah dengan ikatan sosial dan budaya yang menjadi dasar bagi interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 2016: 48).

Pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Sulastrri mengemukakan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi, guna menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sulastrri, 2019: 118). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mencakup keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Ikhsan, 2020: 92). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kunci untuk menciptakan

pembangunan yang adil dan merata, di mana setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut (Santosa, 2021: 134).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan potensi lokal masyarakat. Dalam konteks desa, partisipasi ini sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk memberikan kontribusi berupa ide, tenaga, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kondisi serta budaya lokal. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki, keterikatan, dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip dalam Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah proses penting yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Agar partisipasi ini efektif, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dan diterapkan. Adapun prinsip-prinsip partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keterlibatan Aktif

Partisipasi masyarakat harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini bukan sekadar hadir, tetapi turut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan dalam pembangunan, karena mereka yang paling mengetahui kebutuhan dan kondisi di lapangan (Suharto, 2015: 112).

2. Prinsip Keadilan Sosial

Partisipasi yang inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan sosial dalam partisipasi masyarakat berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, diberikan hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan (Siregar, 2017: 153).

3. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam partisipasi masyarakat. Tanpa adanya transparansi, masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan apa dampaknya terhadap kehidupan mereka. Untuk menciptakan partisipasi yang efektif, setiap proses pengambilan keputusan harus transparan, dan pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil (Fitria, 2018: 88).

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu prinsip penting dalam partisipasi. Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam proses partisipasi tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil (Tiarno, 2020: 42).

5. Prinsip Keterbukaan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Pentingnya keterbukaan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, memberi masukan, dan merasakan dampak dari keputusan tersebut. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan yang berkelanjutan (Mulyani, 2019: 74).

6. Prinsip Kolaborasi dan Sinergi

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan. Kolaborasi ini menciptakan

sinergi yang dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan yang dilakukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan akan menciptakan hasil yang lebih baik, karena melibatkan kedua belah pihak secara aktif (Setiawan, 2021: 65).

Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip partisipasi masyarakat yang efektif harus melibatkan masyarakat secara aktif, memastikan keadilan sosial, menjunjung transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat pemberdayaan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan elemen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa memperlancar atau menghambat keterlibatannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu memahami kebijakan publik dan lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran politik dan sosial masyarakat, sehingga mereka lebih mudah terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan (Suharto, 2015: 119).

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat utama dalam partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Masyarakat yang menghadapi masalah ekonomi cenderung lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka dan kurang memiliki waktu atau energi untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau politik.

Keterbatasan ekonomi sering kali membuat masyarakat kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan waktu dan sumber daya (Fitria, 2018: 92).

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Norma sosial, nilai budaya, dan tingkat keterbukaan dalam komunitas dapat menentukan seberapa besar partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Di masyarakat yang memiliki budaya gotong royong yang kuat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial cenderung lebih tinggi karena adanya ikatan sosial yang kuat antarwarga (Siregar, 2017: 160).

4. Faktor Kepemimpinan dan Pemerintah

Kualitas kepemimpinan dan peran pemerintah sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Pemimpin yang transparan, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mendorong partisipasi yang lebih aktif. Pemerintah yang mengedepankan prinsip partisipatif dan memberikan ruang untuk dialog dengan masyarakat akan lebih berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Mulyani, 2019: 76).

5. Faktor Media dan Teknologi

Media dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Akses yang lebih mudah ke informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan informasi tentang kebijakan atau kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Media massa dan teknologi informasi memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dengan memberikan akses langsung kepada publik untuk berinteraksi dan memberikan pendapat mereka (Tiarno, 2020: 48).

6. Faktor Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi, karena mereka merasa keputusan yang diambil akan memberi dampak positif bagi mereka. Kepercayaan terhadap pemerintah menjadi

pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan, karena mereka yakin suara mereka akan didengar dan dihargai (Setiawan, 2021: 70).

7. Faktor Motivasi dan Kesadaran Politik

Faktor motivasi dan kesadaran politik individu juga sangat penting dalam mendorong partisipasi. Individu yang sadar akan hak-hak politik dan sosialnya cenderung lebih aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kesadaran politik yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam keputusan-keputusan politik dan sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka (Jamaluddin, 2022: 81).

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kepemimpinan, media dan teknologi, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi dan kesadaran politik. Semua faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, perhatian terhadap faktor-faktor tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan partisipasi yang lebih inklusif dan efektif dalam pembangunan.

2.1.1.4 Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang menggambarkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Adapun beberapa indikator partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Indikator Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah indikator utama dari partisipasi masyarakat. Keterlibatan ini bisa dilihat dari sejauh mana masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, ide, dan kontribusinya dalam perencanaan dan kebijakan publik. Indikator partisipasi yang paling mendasar adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka (Suharto, 2015: 121).

2. Indikator Akses terhadap Informasi

Akses terhadap informasi adalah indikator penting dalam partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses yang baik terhadap informasi mengenai kebijakan, proyek pembangunan, atau masalah sosial lainnya, akan lebih mudah untuk berpartisipasi secara aktif. Akses terhadap informasi yang transparan dan terbuka memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi, karena mereka memahami apa yang terjadi dan dapat memberikan kontribusi berdasarkan informasi yang ada (Fitria, 2018: 94).

3. Indikator Pengambilan Keputusan Bersama

Pentingnya pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai indikator partisipasi masyarakat. Keputusan yang diambil secara kolaboratif mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Indikator partisipasi yang jelas adalah sejauh mana keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat (Siregar, 2017: 162).

4. Indikator Tingkat Aktivitas dalam Kegiatan Sosial dan Politik

Tingkat aktivitas masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, seperti pemilu, rapat umum, atau kegiatan komunitas, adalah indikator yang penting untuk mengukur partisipasi. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Partisipasi masyarakat dapat diukur dari tingkat keaktifan mereka dalam berbagai kegiatan sosial-politik, seperti ikut serta dalam pemilu atau rapat desa yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan (Mulyani, 2019: 78).

5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai indikator partisipasi yang relevan. Pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka dalam proses pembangunan. Indikator partisipasi yang efektif adalah sejauh mana masyarakat merasa diberdayakan untuk mengambil inisiatif dan

membuat keputusan dalam pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Tiarno, 2020: 51).

6. Indikator Akses terhadap Sumber Daya

Akses terhadap sumber daya, baik itu berupa informasi, dana, maupun fasilitas lainnya, merupakan indikator partisipasi masyarakat yang tidak kalah penting. Partisipasi yang tinggi terjadi ketika masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada kemauan untuk terlibat, tetapi juga pada akses yang mereka miliki terhadap berbagai sumber daya yang mendukung aktivitas partisipasi mereka (Setiawan, 2021: 73).

7. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Kebijakan

Salah satu indikator partisipasi yang penting adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kebijakan yang telah diterapkan. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan mereka, maka ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan telah berjalan dengan baik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan adalah indikator penting dalam mengukur efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Jamaluddin, 2022: 85).

Indikator-indikator partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap informasi, pengambilan keputusan bersama, tingkat aktivitas dalam kegiatan sosial dan politik, pemberdayaan masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan tingkat kepuasan terhadap hasil kebijakan. Semua indikator ini saling berkaitan dan menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berlangsung.

2.1.2 Tinjauan tentang Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan dan masyarakat yang memiliki ciri khas berupa kehidupan yang lebih dekat dengan alam dan tradisi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kekuatan lokal. Di Indonesia, desa memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi negara. Seiring dengan perkembangan zaman, desa juga mengalami berbagai perubahan baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siregar (2017) mengemukakan bahwa: Desa bukan hanya sekadar unit administratif, tetapi juga sebagai unit sosial yang memiliki identitas kultural dan potensi ekonomi yang berperan dalam pembangunan negara (Siregar, 2017: 42). Desa merupakan sebuah unit sosial yang terorganisir dengan norma dan struktur yang mengatur kehidupan sosial, dan berfungsi sebagai tempat interaksi antarwarga yang mendasari pembangunan sosial dan ekonomi (Mulyani, 2019: 58). Desa merupakan ruang kehidupan yang memiliki nilai-nilai kultural, sosial, dan ekonomi yang khas, serta berperan aktif dalam pembangunan dengan melibatkan semua unsur masyarakat dalam setiap prosesnya (Jamaluddin, 2022: 72).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian desa menurut berbagai ahli di atas memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar unit administratif. Desa dipandang sebagai komunitas sosial dengan nilai budaya yang khas, sebagai pusat kehidupan ekonomi dan sosial, serta sebagai subjek dalam pembangunan. Desa juga berperan penting dalam menjaga kearifan lokal dan memperkuat hubungan sosial antarwarga.

2.1.2.2 Karakteristik Desa

Desa memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kawasan perkotaan, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Menurut Siregar mengemukakan bahwa: Karakteristik utama desa terletak pada kekuatan hubungan sosial yang terbentuk atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta dominasi nilai budaya yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat (Siregar, 2017: 49). Mulyani mengemukakan bahwa: Desa memiliki karakteristik hubungan sosial yang erat antarwarga, dengan struktur pemerintahan yang lebih sederhana dan lebih partisipatif dalam pengambilan keputusan (Mulyani, 2019: 62). Setiawan mengemukakan bahwa: Karakteristik desa yang paling mencolok adalah ketergantungan pada sektor pertanian atau perikanan, yang seringkali menjadi sumber utama ekonomi masyarakat desa (Setiawan, 2021: 63). Tiarno mengemukakan bahwa: Karakteristik desa yang khas adalah adanya rasa solidaritas sosial yang tinggi, yang tercermin dalam kegiatan gotong royong dan perayaan adat yang melibatkan seluruh masyarakat (Tiarno, 2020: 39). Jamaluddin mengemukakan bahwa: Karakteristik desa yang sangat menonjol adalah keterikatan yang kuat antara masyarakat dengan alam sekitar, di mana mereka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga kelestariannya (Jamaluddin, 2022: 74). Sedangkan menurut Fitria mengemukakan bahwa: Karakteristik desa saat ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat akses terhadap teknologi dan informasi, yang memungkinkan desa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas pembangunan (Fitria, 2018: 110).

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik desa meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar. Desa memiliki struktur sosial yang erat, bergantung pada sektor pertanian atau perikanan, serta menjaga tradisi dan budaya lokal. Selain itu, karakteristik desa juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan penggunaan teknologi dalam proses pembangunan.

2.1.2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat desa yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat desa dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pemerintahan desa bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya lokal dan menjalankan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat. Di Indonesia, pengelolaan pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa otonomi lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terdiri dari dua unsur utama: Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan umum desa (Pilkades). Sedangkan perangkat desa terdiri dari beberapa jabatan yang mendukung kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, antara lain sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan staf administrasi lainnya. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa, serta perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Siregar mengemukakan bahwa: Pemerintahan desa adalah sistem yang memungkinkan desa untuk mengelola urusan rumah tangga secara mandiri, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Siregar, 2017: 56). Mulyani mengemukakan bahwa: Pemerintahan desa tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, tetapi juga dalam melaksanakan fungsi sebagai fasilitator pembangunan yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Mulyani, 2019: 82). Jamaluddin mengemukakan bahwa: Pemerintahan desa sangat kental dengan prinsip musyawarah mufakat, di mana setiap kebijakan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama dan melibatkan seluruh elemen masyarakat

desa (Jamaluddin, 2022: 80). Sedangkan menurut Fitria mengemukakan bahwa: Pemerintahan desa yang efektif adalah pemerintahan yang dapat mendengar dan merespon kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa secara langsung, dan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan yang diambil (Fitria, 2018: 104).

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa menurut para ahli di atas memiliki karakteristik yang mencakup prinsip desentralisasi, partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip musyawarah mufakat. Pemerintahan desa berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengelola sumber daya secara efisien. Selain itu, pemerintahan desa juga bertanggung jawab dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

2.1.3 Tinjauan tentang Pembangunan Desa

2.1.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan yang terencana dan berkesinambungan. Pembangunan mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan di seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian pembangunan menurut Suryana mengemukakan bahwa: Pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup perbaikan dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berkelanjutan (Suryana, 2018: 74). Sedangkan menurut Mubyarto mengemukakan bahwa: Pembangunan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui pemerataan dan keadilan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik dan merata (Mubyarto, 2019: 56).

Pengertian pembangunan desa menurut Siregar mengemukakan bahwa: Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan partisipatif dan inklusif (Siregar, 2017: 87). Mulyani mengemukakan bahwa: Pembangunan desa merupakan proses pengembangan yang

melibatkan potensi lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya yang ada (Mulyani, 2019: 110). Sedangkan menurut Setiawan mengemukakan bahwa: Pembangunan desa harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan fokus pada keberlanjutan (Setiawan, 2021: 99).

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa menurut para ahli di atas merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Pembangunan desa harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

2.1.3.2 Aspek-aspek Pembangunan Desa

Pembangunan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Fokus pembangunan desa juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Pembangunan desa mencakup beberapa aspek yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, infrastruktur, dan kelembagaan. Menurut Siregar mengemukakan bahwa: Aspek-aspek pembangunan desa harus dilihat secara holistik, di mana pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur harus saling mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh (Siregar, 2017: 92). Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya mengarah pada pembangunan fisik saja, tetapi juga mencakup pembangunan sosial dan budaya yang berkelanjutan.

Menurut Mulyani mengemukakan bahwa: Pembangunan desa harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas manusia, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Mulyani, 2019: 115). Aspek-

aspek pembangunan desa meliputi beberapa hal, yaitu pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam proses pembangunan desa, karena masyarakat desa harus terlibat secara langsung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Menurut Setiawan mengemukakan bahwa: Pembangunan desa yang sukses harus memperhatikan keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Setiawan, 2021: 123). Pembangunan desa harus mencakup lima aspek utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Aspek ekonomi fokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah, sementara aspek sosial dan politik berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penguatan demokrasi lokal.

Menurut Tiarno mengemukakan bahwa: Pembangunan desa harus melibatkan pembangunan fisik yang mencakup infrastruktur dasar, pembangunan sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Tiarno, 2020: 76). Ada empat aspek yang menjadi fokus utama dalam pembangunan desa, yaitu pembangunan fisik, pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek utama karena masyarakat desa yang diberdayakan akan lebih mampu mengelola potensi yang ada untuk kemajuan desanya.

Menurut Jamaluddin mengungkapkan bahwa: Pembangunan desa yang berkelanjutan harus melibatkan peningkatan sektor ekonomi lokal, pemerataan pendidikan, dan penguatan jaringan sosial antar masyarakat, agar tercipta desa yang mandiri dan berdaya saing (Jamaluddin, 2022: 133). Beberapa aspek penting dalam pembangunan desa, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pembangunan pendidikan dan sektor ekonomi menjadi aspek penting yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

Sedangkan menurut Fitria mengemukakan bahwa: Pembangunan desa harus mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya, karena aspek-aspek ini sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan (Fitria, 2018: 112). Dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan peningkatan fasilitas kesehatan serta pendidikan menjadi faktor penentu dalam menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa menurut para ahli di atas melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Setiap aspek ini memiliki peran yang penting dalam menciptakan desa yang sejahtera dan berkelanjutan. Pembangunan desa yang inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing.

2.1.3.3 Tujuan Pembangunan Desa

Menurut Siregar mengemukakan bahwa: Tujuan pembangunan desa adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi, pemerataan sosial, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat desa (Siregar, 2017: 101). Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh, yang melibatkan perbaikan dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Selain itu, tujuan pembangunan desa adalah untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.

Menurut Mulyani mengemukakan bahwa: Tujuan pembangunan desa adalah untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan dengan cara memberdayakan masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya alam yang ada (Mulyani, 2019: 120). Tujuan pembangunan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa. Pembangunan desa harus difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan menciptakan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Menurut Setiawan mengemukakan bahwa: Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menciptakan kesempatan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri (Setiawan, 2021: 134). Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan kesempatan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pembangunan desa juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan dari luar dengan membangun kemandirian melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Tiarno mengemukakan bahwa: Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan yang berkelanjutan, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Tiarno, 2020: 82). Tujuan pembangunan desa adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa dengan meningkatkan sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang sejahtera dan berkelanjutan dengan mengutamakan pemerataan dalam pembangunan.

Menurut Jamaluddin mengemukakan bahwa: Tujuan pembangunan desa adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang setara pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Jamaluddin, 2022: 139). Pembangunan desa harus menciptakan kesempatan yang setara untuk seluruh masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan menurut Fitria mengemukakan bahwa: Tujuan pembangunan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi manusia yang ada di desa, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar (Fitria, 2018: 118). Tujuan pembangunan desa adalah untuk mewujudkan kemandirian desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi manusia yang ada di desa. Selain itu, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur,

kesehatan, dan pendidikan di desa, agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan produktif.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan desa menurut para ahli di atas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Pembangunan desa harus berfokus pada pencapaian kemandirian desa, pemerataan kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota. Selain itu, pembangunan desa juga harus memperhatikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi yang ada di desa.

2.1.3.4 Indikator Pembangunan Desa

Menurut Siregar mengemukakan bahwa: Indikator pembangunan desa mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur, yang dapat diukur melalui pendapatan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan fisik desa (Siregar, 2017: 105). Indikator pembangunan desa dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni aspek ekonomi, sosial, dan fisik. Indikator ekonomi meliputi pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan, sedangkan indikator sosial meliputi tingkat partisipasi masyarakat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keadilan sosial. Indikator fisik berkaitan dengan kualitas infrastruktur seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Mulyani mengemukakan bahwa: Indikator pembangunan desa harus mencakup aspek-aspek sosial dan ekonomi, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan (Mulyani, 2019: 133). Indikator pembangunan desa mencakup indikator-indikator yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketersediaan dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, serta akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut Setiawan mengemukakan bahwa: Indikator pembangunan desa meliputi dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, yang semuanya harus sejalan untuk menciptakan desa yang berkelanjutan dan sejahtera (Setiawan, 2021: 141). Indikator pembangunan desa terdiri dari beberapa dimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dalam dimensi ekonomi, indikator yang relevan antara lain adalah pendapatan masyarakat, akses terhadap lapangan kerja, dan ketahanan ekonomi desa. Sedangkan dalam dimensi sosial, indikator yang digunakan mencakup tingkat pendidikan, kesehatan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurut Tiarno mengemukakan bahwa: Indikator utama dalam pembangunan desa meliputi kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat desa (Tiarno, 2020: 88). Indikator pembangunan desa dapat dilihat dari peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, indikator lainnya termasuk infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan transportasi, serta kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

Menurut Fitria mengemukakan bahwa: Indikator pembangunan desa harus berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial, untuk menciptakan desa yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat (Fitria, 2018: 125). Indikator yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial dalam pembangunan desa. Indikator pendidikan meliputi tingkat melek huruf, partisipasi pendidikan formal, dan keterampilan masyarakat. Indikator kesehatan mencakup angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Sementara itu, indikator ketahanan sosial mencakup pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Sedangkan menurut Jamaluddin mengemukakan bahwa: Indikator pembangunan desa yang komprehensif harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur, untuk menciptakan desa yang lebih baik dan berkelanjutan (Jamaluddin, 2022: 147). Indikator pembangunan desa dapat dilihat dari tiga kategori utama: indikator ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Indikator ekonomi meliputi pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan, sementara indikator sosial

meliputi tingkat partisipasi masyarakat, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial. Dalam hal infrastruktur, indikator yang relevan termasuk akses terhadap jalan, energi, air bersih, dan sanitasi.

Dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan desa menurut para ahli di atas melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu ekonomi, sosial, dan fisik. Indikator ekonomi seperti pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan, indikator sosial seperti partisipasi masyarakat dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan, serta indikator fisik yang meliputi kualitas infrastruktur desa, merupakan hal-hal yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa. Semua indikator ini harus seimbang dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Jamaludin yakni: (1) Indikator Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan; (2) Indikator Akses terhadap Informasi; (3) Indikator Pengambilan Keputusan Bersama; (4) Indikator Tingkat Aktivitas dalam Kegiatan Sosial dan Politik; (5) Indikator Pemberdayaan Masyarakat; (6) Indikator Akses terhadap Sumber Daya; (7) Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Kebijakan

2.1.4 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Desa

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan alokasi dana, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan dampak pembangunan di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Menurut Siregar mengemukakan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan. Masyarakat yang terlibat aktif akan memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan

desa (Siregar, 2017: 112). Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Pembangunan desa yang sukses tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula dampak positifnya terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Menurut Mulyani mengemukakan bahwa: Pembangunan desa akan lebih efektif jika masyarakat terlibat dalam setiap tahap proses pembangunan. Partisipasi masyarakat meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program yang ada, yang pada gilirannya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan (Mulyani, 2019: 141). Partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan hasil pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat, program-program pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Menurut Setiawan mengemukakan bahwa: Hubungan antara partisipasi masyarakat dan pembangunan desa sangat penting. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan akan mempercepat tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan" (Setiawan, 2021: 157). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi ini mengarah pada pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Tiarno mengemukakan bahwa: Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar partisipasi dalam pelaksanaan proyek, tetapi lebih kepada keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa (Tiarno, 2020: 95). Hubungan antara partisipasi masyarakat dan pembangunan desa sangat penting, karena masyarakat yang terlibat

dalam proses pembangunan akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga memastikan bahwa proyek pembangunan yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Menurut Fitria mengemukakan bahwa: Hubungan antara partisipasi masyarakat dan pembangunan desa sangat erat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa akan meningkatkan kepedulian dan keberhasilan pembangunan itu sendiri (Fitria, 2018: 131). Partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa, karena melalui partisipasi tersebut, masyarakat dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengawasi jalannya pembangunan. Dengan adanya partisipasi, pembangunan desa menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Jamaluddin mengungkapkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berhubungan langsung dengan kualitas pembangunan itu sendiri. Masyarakat yang terlibat aktif akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk menjaga dan melestarikan hasil pembangunan yang telah dicapai (Jamaluddin, 2022: 158). Partisipasi masyarakat adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan desa yang sukses. Partisipasi masyarakat memungkinkan terciptanya keberagaman ide dan solusi untuk masalah yang ada di desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembangunan. Partisipasi ini memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan akan merasa memiliki hasil pembangunan tersebut, yang pada gilirannya dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam

mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Untuk lebih jelasnya terkait dengan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mohd Rizki Maulana, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan RKP Desa (Studi Kasus Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, 2022.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, perbedaan teknik analisis data serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif	Adanya partisipasi perencanaan, partisipasi pelaksanaan, partisipasi pemanfaatan dan partisipasi evaluasi dalam proses penyusunan RKP Desa.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Volume 7, Tahun 2022, ISSN: 2549-8363
2	Gusti Ahmad Roby, Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, 2024.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat (x) dan indikator variabel pembangunan desa (y) serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan dua variabel yaitu partisipasi masyarakat (x) dan pembangunan desa (y) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif, teknik penarikan sampel dan teknik analisis	Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.	Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2024, ISSN: 3063-4857

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			data menggunakan regresi linier sederhana.		
3	Asriyanti, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah), 2019.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	(1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa sudah terlaksa dengan baik, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (a) faktor internal (b) faktor eksternal.	Jurnal Selami Ips, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2019, ISSN: 1410-2323
4	Misrawati, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Agam, 2023.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Nagari Koto Baru antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lama tinggal di nagari dan kesadaran masyarakat.	Jurnal Mirai Management, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2023, ISSN: 2598-8301
5	Andi Ahmad Malikul Afdal, Partisipasi Masyarakat	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Partipasi masyarakat Desa Tanah Towa dalam	<i>Journal of Government Insight (JGI)</i> , Volume 3,

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dalam Pembangunan di Desa Tanah Towa, 2023.	variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.		pembangunan masih sangat kurang dibuktikan dengan tiga bentuk partisipasi antara lain, (1) partisipai ide/ pemikiran (2) partisipasi tenaga (3) partisipasi materi.	Nomor 1, Tahun 2023, ISSN: 316-322
6	Emelyati MN, Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa, 2019.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat (x) dan indikator variabel pembangunan desa (y) serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan dua variabel yaitu partisipasi masyarakat (x) dan pembangunan desa (y) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif, teknik penarikan sampel dan teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana.	Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Teraju.	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN: 2442-6962
7	Ainur Rofiq, Tingkat Parsitipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa, 2023.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi meliputi sosialisasi, pengumpulan data, identifikasi potensi dan masalah, sumbangan pemikiran, serta partisipasi aktif	Jurnal At Tamkin Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2023, ISSN: 2829-6338

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dalam pelaksanaan pembangunan fisik.	
8	Andi Uceng, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, 2019.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat (x) dan indikator variabel pembangunan desa (y), teknik penarikan sampel serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan dua variabel yaitu partisipasi masyarakat (x) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana.	Terdapat pengaruh yang kuat antara tingkat partisipasi masyarakat dengan pembangunan Sumber Daya Manusia.	Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN: 2622-6915
9	Ari Ashadi, Analisis Partisipasi Warga Miskin dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Nagari di Nagari Tanjung Alam dan Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar, 2021.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Ruang lingkup partisipasi masyarakat miskin dan proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan nagari dalam pelibatan multistakeholder dalam perumusan perencanaan pembangunan nagari baik di Nagari Tanjung Alam maupun di Nagari Sumanik telah sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	Jurnal Menara Ilmu, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2021, ISSN: 2528-7613
10	Dina Roswita, Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat sangat	Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomi Bisnis, Volume 22, Nomor 1, Tahun 2019,

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, 2019.	partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.		berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.	ISSN: 2621-1246
11	Syafliansyah, Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Maluhu di Kecamatan Tenggarong, 2022.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat (x) dan indikator variabel pembangunan desa (y), menggunakan teknik penarikan sampel yang berbeda, serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan dua variabel yaitu partisipasi masyarakat (x) dan pembangunan desa (y) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data regresi linier sederhana.	Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Desa Maluhu di Kecamatan Tenggarong.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2022, ISSN: 2775-7129
12	Lina Mutmainnah, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, 2019.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat (x) dan indikator variabel pembangunan desa (y), menggunakan teknik penarikan sampel yang berbeda, serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan dua variabel yaitu partisipasi masyarakat (x) dan pembangunan desa (y) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data regresi linier sederhana.	Peran serta masyarakat dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.	Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2019, ISSN: 2302-7061

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Vina Ompusunggu, Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Pembangunan Irigasi di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu), 2017.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Proses perencanaan pembangunan tidak di jalankan dengan baik di Desa Namo Bintang, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah, masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan sesuai dengan yang mereka butuhkan.	Jurnal Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara), Volume 10, Nomor 1, Tahun 2017, ISSN: 1979-8164
14	Lilin Apriyani, Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 2019.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kriteria partisipasinya.	Jurnal Citizenship, volume 2, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN: 2614-0039
15	Zaenudin, Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes) terhadap Tingkat Pembangunan di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, 2023.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Tingkat pembangunan yang dilakukan cukup pesat dimana ini terlihat dari besarnya anggaran yang telah direalisasikan dalam bidang pembangunan, pesatnya pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan tingginya tingkat partisipasi	Jurnal Hawalah Kajian Ilmu Ekonomi Syari'ah, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2023, ISSN: 2963-3435

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				masyarakat yang ada.	
16	Antonius, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk, 2024.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Lengkenat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, hingga pelaksanaan perencanaan pembangunan desa selesai. Faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah karena sebagian besar masyarakat kurang berperan aktif.	Jurnal Fokus, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2024, ISSN: 2599-3518
17	Nadhira Nurkhalisa, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, 2024.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Desa Telukjambe dari mulai pembangunan fisik infrastruktur sudah cukup baik. Faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran sebagian masyarakat pada bentuk partisipasi	Jurnal <i>Communnity Development Journal</i> , Volume 5, Nomor 1, Tahun 2024, ISSN: 2721- 4990

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang mereka lakukan.	
18	Listyani Nur Baihati, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak, 2017.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemerintah desa melibatkan semua unsur masyarakat.	Jurnal administrasi Pemerintahan Desa, Volume 2, Nomor 10, Tahun 2017, ISSN: 2442-2576
19	Agus Hariyanto, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Nusa Maju, Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan), 2024.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat, menggunakan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat.	(1) Tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal perencanaan di desa Nusa Maju sudah baik (2) Pemerintah Desa Nusa Maju telah berupaya maksimal dengan melakukan beberapa strategi.	Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024, ISSN: 2684-9836
20	Setya Nanda Anggela Putri, Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Proses Pembangunan Desa Sendangrejo Kabupaten Lamongan, 2023.	Menggunakan teori yang berbeda untuk indikator variabel partisipasi masyarakat (x) dan indikator variabel pembangunan desa (y), menggunakan teknik penarikan sampel yang berbeda, teknik analisis	Menggunakan variabel partisipasi masyarakat (x) dan pembangunan desa (y) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif.	(1) Motivasi berpengaruh terhadap proses pembangunan di Desa Sendangrejo (2) Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap proses pembangunan di Desa Sendangrejo.	Jurnal PRAJA Observer, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2023, ISSN: 2797-0469

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		data yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.			

Sejalan dengan kajian empiris/ kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, kelebihan penelitian terdahulu serta kekurangan dari penelitian terdahulu. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: (1) Penggunaan variabel partisipasi masyarakat untuk variabel independen dan variabel pembangunan desa untuk variabel dependen sebagai objek penelitian; (2) Penggunaan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data penelitian; (3) Penggunaan metode kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* dan teknik analisis data regresi linier sederhana.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Penggunaan teori dalam objek penelitian yang dijadikan sebagai variabel independen dan variabel dependen; (2) Penggunaan indikator dalam variabel penelitian; (3) Penggunaan metode penelitian, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data; (4) Subjek penelitian yang dijadikan sumber data serta lokasi penelitian.

Terkait dengan kelebihan penelitian terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu telah banyak berkontribusi dalam memperjelas konsep partisipasi masyarakat. Dengan mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi, baik yang bersifat formal (misalnya, kehadiran dalam rapat desa atau pemilihan kepala desa) maupun informal (misalnya, kontribusi sukarela dalam kegiatan sosial), penelitian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan desa. Sebagian besar penelitian menjelaskan bahwa partisipasi bukan hanya tentang kontribusi fisik atau finansial, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sebagian besar penelitian terdahulu berhasil mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik faktor ekonomi, sosial budaya, politik serta infrastruktur dan aksesibilitas. Penelitian terdahulu juga memberikan masukan yang sangat berguna bagi pengembangan kebijakan publik. Dengan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi, kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah desa dapat disesuaikan agar lebih efektif. Misalnya, penentuan jenis program pembangunan yang lebih bersifat inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan atau penyuluhan.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering kali juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan manfaat partisipasi, penelitian ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Adapun kekurangan dari penelitian terdahulu adalah keterbatasan sampel, salah satu kelemahan utama dalam banyak penelitian terdahulu adalah keterbatasan dalam hal sampel. Kemudian kurangnya perspektif jangka panjang, banyak penelitian yang hanya fokus pada dampak jangka pendek dari partisipasi masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur atau akses terhadap layanan dasar. Penelitian yang lebih sedikit memberikan perhatian pada dampak jangka panjang, seperti perubahan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, atau perubahan dalam struktur kekuasaan lokal. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan dan pemerintahan desa yang lebih mandiri sering kali baru terlihat setelah beberapa tahun, sehingga kurang menjadi perhatian dalam penelitian.

Novelty dari penelitian yang akan dilakukan adalah mengatasi ketidaksetaraan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Sering kali penelitian tidak cukup memperhatikan ketidaksetaraan dalam partisipasi, terutama di kalangan kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, atau masyarakat

miskin. Penelitian yang lebih banyak dilakukan di tingkat desa umum cenderung mengabaikan bagaimana kelompok tertentu tidak mendapatkan akses atau ruang untuk berpartisipasi, bahkan ketika kebijakan pembangunan dirancang untuk inklusivitas. Misalnya, perempuan di banyak desa cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah karena budaya patriarki atau hambatan sosial lainnya. Penelitian yang tidak memfokuskan diri pada isu ini bisa berisiko mengabaikan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sukasenang, untuk mengetahui serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebut dan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program pembangunan di Desa Sukasenang. Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan mengembangkan konsep dan teori yang berkaitan dengan dua variabel utama yaitu variabel partisipasi masyarakat dan variabel pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan suatu program atau proyek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi, guna menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sulastri, 2019: 118).

Adapun indikator dari variabel partisipasi masyarakat diantaranya: (1) Indikator Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan; (2) Indikator Akses terhadap Informasi; (3) Indikator Pengambilan Keputusan Bersama; (4) Indikator Tingkat Aktivitas dalam Kegiatan Sosial dan Politik; (5) Indikator Pemberdayaan Masyarakat; (6) Indikator Akses terhadap Sumber Daya; (7) Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Kebijakan.

Tingkat partisipasi yang tinggi diyakini dapat meningkatkan keberhasilan program pembangunan, karena masyarakat merasa memiliki, terlibat aktif, dan bertanggung jawab terhadap hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan desa merujuk pada berbagai usaha dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa melalui perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan potensi lokal. Pembangunan desa mencakup banyak aspek, mulai dari pembangunan fisik (seperti infrastruktur), sosial (pendidikan dan kesehatan), ekonomi (pertanian, kerajinan), hingga budaya. Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan partisipatif dan inklusif (Siregar, 2017: 87).

Indikator dari variabel pembangunan desa diantaranya: (1) indikator ekonomi meliputi pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan; (2) indikator sosial meliputi tingkat partisipasi masyarakat, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial; (3) indikator infrastruktur meliputi akses terhadap jalan, energi, air bersih, dan sanitasi.

Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Pembangunan yang partisipatif dapat membawa hasil yang lebih baik karena masyarakat desa lebih memahami kebutuhan dan potensi mereka, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa. Menurut Jamaluddin mengungkapkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berhubungan langsung dengan kualitas pembangunan itu sendiri. Masyarakat yang terlibat aktif akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk menjaga dan melestarikan hasil pembangunan yang telah dicapai (Jamaluddin, 2022: 158).

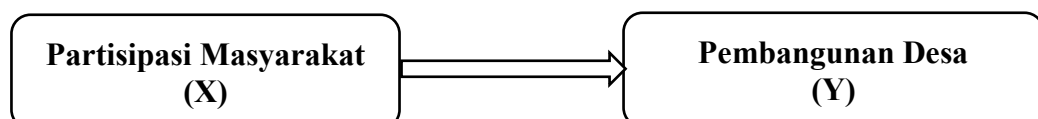
Masyarakat yang berpartisipasi aktif dapat menyumbangkan ide, keahlian, serta tenaga dalam berbagai proses pembangunan. Dengan demikian, tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di desa.

Desa Sukasenang merupakan salah satu desa yang sedang menjalankan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program-program ini mencakup bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun, keberhasilan program-program pembangunan tersebut bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat Desa Sukasenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya peningkatan kualitas pembangunan desa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hasil pembangunan yang tercapai di Desa Sukasenang.

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Melalui partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Sukasenang. Untuk lebih mempermudah dalam memahami konsep dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₀ Tingkat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis
- H₁ Tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis